



Pelimpahan Pengelolaan Pasar Sangsit

Bagi Hasil

Masih Jadi Ganjalan

Tim Pemkab menilai tawaran *sharing* bagi hasil dari tim ekonomi Desa Sangsit belum memenuhi regulasi sistem akuntansi. Namun, tawaran itu akan tetap disampaikan kepada Bupati.

SINGARAJA, NusaBali

Sharing bagi hasil dalam pelimpahan pengelolaan Pasar Sangsit di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan belum ada titik temu. Tim Pemkab menilai tawaran *sharing* bagi hasil dari tim ekonomi Desa Sangsit belum memenuhi regulasi dari sisi sistem Akuntansi. Kendati demikian, tawaran *sharing* bagi hasil dari tim ekonomi Desa Sangsit tersebut akan secepatnya disampaikan pada Bupati selaku pengambil keputusan.

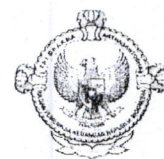


PASAR Sangsit yang direncanakan dilimpahkan pengelolaanya ke Desa Adat Pakraman Sangsit Dauh Yeh atas keinginan dari pihak adat sendiri.

"Memang suratnya (tawaran *sharing* bagi hasil dari tim ekonomi Desa Sangsit, red) sudah kami terima, besok (Senin, 4/5) kita akan sampaikan pada pak bupati. Keputusannya kan ada pada pak bupati. Tentu nanti ada kajian dari kami juga," terang Koordinator Tim Pemkab, I Ketut Suparto yang juga Kabag Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setkab Buleleng, Minggu (4/5).

Menurut Suparto, *sharing* bagi

hasil sebesar 20 persen dari Dana Kontribusi yang ditawarkan oleh tim ekonomi Desa Sangsit, belum memenuhi sistem Akuntansi. Disebutkan, dalam sistem Akuntansi, *sharing* bagi hasil itu bersumber dari pendapatan yang telah dikurangi biaya-biaya yang disebut laba bersih atau sisa hasil usaha (SHU). Dalam kajiannya, *sharing* bagi hasil yang ditawarkan sebesar 30 persen dari SHU. "Kajian kami, yang namanya *sharing* bagi



Sambungan - -

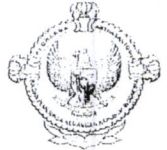
hasil sesuai system Akuntansi itu diambilkan dari SHU itu, bukan dari dana kontribusi. Kalau Dana Kontribusi itu kan dana SHU yang sudah dibagi-bagikan baik ke dana cadangan, organisasi dan kontribusi," jelasnya.

Kendati demikian, sharing bagi hasil yang ditawarkan tim ekonomi Desa Sangsit tetap akan disampaikan kepada bupati dengan melampirkan kajian dari tim Pemkab sebagai bahan perbandingan dalam pengambilan keputusan. "Tergantung nanti pak bupati yang memutuskan, kalau kami kan hanya memberikan kajian menurut kami, keputusan tetap pada pak bupati," ujar Suparto.

Sebelumnya, tim ekonomi Desa Sangsit memilih opsi mengelola ketimbang hibah murni dalam pelimpahan Pasar Sangsit. Tim juga merumuskan pola sharing bagi hasil yang harus disetorkan ke Pemkab. Dalam rumusan disebutkan, sharing bagi hasil itu akan diambilkan dari dana kontribusi dengan rincian, 20 persen disetor ke Pemkab dan 80 persennya disetor ke kas adat. Dana kontribusi itu merupakan bagian dari beberapa pos dana yang ber-

sumber dari laba bersih atas pengelolaan pasar. Rinciannya, dari laba bersih akan didistribusikan ke pos dana cadangan sebesar 5 persen, kemudian untuk dana organisasi sebesar 10 persen, sedangkan sisanya lagi 85 persen sebagai dana kontribusi. Nah dari dana kontribusi inilah nanti, akan disetorkan ke Pemkab sebesar 20 persennya sebagai kewajiban atas pengelolaan Pasar Sangsit.

Semula, tim Pakraman Sangsit Dauh Yeh menginginkan agar pengelolaan pasar Sangsit dihibahkan secara murni, sehingga pihak adat tidak memiliki kewajiban menyerahkan pendapatan ke Pemkab Buleleng sebagai sharing bagi hasil. Oleh tim Pemkab, jika pengelolaan Pasar Sangsit dihibahkan secara murni, maka harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) karena menyangkut pelepasan asset senilai Rp 1 miliar lebih berupa bangunan pasar. Disamping itu, permohonan awal pihak adat ke Pemkab Buleleng adalah pengelolaan pasar, bukan mohon hibah. Karena itu, tim Pemkab yang dimotori oleh Kabag Ekbang Suparto minta agar pihak Adat mengkaji kembali permohonannya. **k19**



Retribusi Parkir Ditarget Rp 1,65 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas perhubungan, tahun ini menargetkan pendapatan dari retribusi parkir sebesar Rp 1,65 miliar. Target tersebut dikatakan bersumber dari parkir tepi jalan umum dan parkir khusus. Untuk mencapai target tersebut, Dishub pun telah menetapkan kenaikan tarif parkir sejak 20 Maret 2015 lalu.

"Tahun ini untuk retribusi parkir tahun ini ditargetkan sebesar Rp. 1,65 Miliar yang bersumber dari tarif parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 1,4 Miliar dan tarif parkir khusus sebesar Rp. 250 Juta," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan AP, Minggu (3/5).

Gunawan mengaku untuk memenuhi target tersebut, saat ini sedang digalakkan pengawasan areal parkir, dari petugas Dishub. Termasuk tukang parkir yang nakal, tanpa memberikan karcis parkir. Selain itu, penetapan kenaikan ongkos parkir, juga telah dilakukan per Maret lalu.

Saat ini pihaknya mengatakan tidak memberlakukan sewa parkir yang berbeda antara parkir tepi jalan dengan parkir khusus. Untuk sepeda motor saat ini dikenakan biaya parkir Rp. 1.000, sedangkan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000. "Kenaikan tarif secara serentak sudah ditetapkan sejak Maret kemarin, sesuai dengan kebijakan daerah yang berlaku saat ini," imbuh dia.

Sementara Dishub Buleleng seperti biasa telah melakukan evaluasi pencapaian target setiap tiga bulan sekali. Saat ini di triwulan pertama semua aspek yang masuk dalam distribusi parkir termasuk pengujian mesin kendaraan sudah diatas target. Hal tersebut terlihat pada retribusi terminal yang tahun ini ditarget sebesar Rp 60 juta, dalam per Maret sudah tercapai Rp 18 juta.

Sama halnya dengan target retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 1,4 Miliar, per triwulan pertama sudah terealisasi sebesar Rp. 416 Juta. Dan pengujian mesin kendaraan yang ditarget Rp. 760 Juta sampai saat ini sudah terealisasi Rp. 230 Juta. Gunawan menyebutkan bahwa pihaknya sangat optimis target yang diberikan oleh Pemkab dapat tercapai, seperti tahun-tahun sebelumnya. "Kami optimis semuanya dapat tercapai, bahkan akan melampaui target. Hal tersebut nantinya akan membantu pemasukan PAD, untuk menunjang pembangunan di Buleleng," pungkas Gunawan. **k23**

Edisi : Senin, 4 Mei 2015

Hal : 4